

**PELAKSANAAN PROGRAM BLM-PUMP
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN
SKALA KECIL DI KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**MUTIA RANI
TM/NIM : 53165/2010**

**JURUSAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Program BLM-PUMP dalam Pemberdayaan Usaha
Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan
.
Nama : Mutia Rani
TM/NIM : 2010/53165
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 Mei 2015

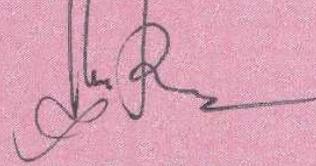
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D
NIP. 19570416 198602 1 001

Pembimbing II



Nora Eka Putri, S.IP.M.Si
NIP. 19850312 200812 2 006

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis tanggal 26 Maret pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Pelaksanaan Program BLM-PUMP dalam Pemberdayaan Usaha
Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan**

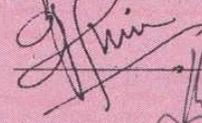
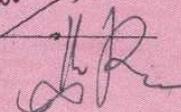
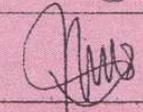
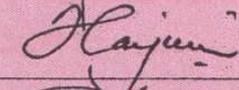
Nama : Mutia Rani
TM/NIM : 2010/53165
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Padang, 05 Mei 2015

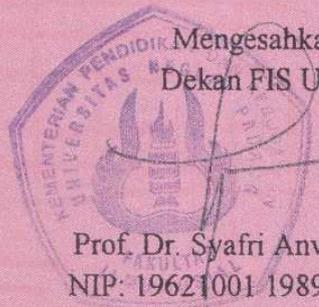
Tim Penguji:

Nama
Ketua : Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D
Sekretaris : Nora Eka Putri, S.IP. M.Si
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si
Anggota : Zikri Alhadi S.IP, MA

Tanda Tangan


Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP: 196210011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Rani
NIM/BP : 2010/53165
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 14 Agustus 1992

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program BLM-PUMP dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai Kavupaten Pesisir Selatan”** adalah benar merupakan hasil karya asli saya sesuai kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab sebagai penulis

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 05 Mei 2015



Mutia Rani

ABSTRAK

MUTIA RANI : (2010/53165) PELAKSANAAN PROGRAM BLM-PUMP DALAM PEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN SKALA KECIL DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Permasalahan nelayan seperti jumlah alat tangkap yang terbatas, pengetahuan nelayan yang minim, masalah politik sosial dan ekonomi. Kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan, sehingga nelayan selalu masuk dalam kategori keluarga miskin. hal ini akan dapat diatasi apabila pelaksanaan program – program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan dapat mengayomi, mengajak, memfasilitasi dengan program - program yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Dengan potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan di wilayah pesisir yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, dan didukung melalui program BLM PUMP oleh Pemerintah, diharapkan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di daerah tersebut dapat terjawab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masyarakat nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. Penentuan informan ditentukan secara *purposive*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan, mengayomi, mengajak, memfasilitasi, meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan melalui program BLM-PUMP secara umum belum berjalan sesuai yang diinginkan. Seperti masih terdapat kendala-kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program BLM-PUMP, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam mencapai hasil yang maksimal. Upaya yang dilakukan Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program sosialisasi yang langsung diberikan kepada perorangan masyarakat nelayan diharapkan agar masyarakat nelayan lebih memahami prosedur pelaksanaan program.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil a'lamiiin, puji syukur kepada ALLAH SWT. Satu satunya penyebab yang pasti sehingga terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ”** ini adalah karena Ridho dan kasih sayang ALLAH. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Ucapan terima kasih terdalam penulis ucapkan untuk Ibunda tercinta ERMAWATI dan Ayahanda EDIWARMAN yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibuk Nora Eka Putri, S.IP.M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D, dan Bapak Zikri Alhadi S.IP. MA terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
6. Seluruh pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan, Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Padang, 05 Mei 2015

Mutia Rani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah	13
E. Fokus Penelitian Penelitian	13
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	14
II. KAJIAN TEORITIS	15
A. Pemberdayaan	15
1. Konsep Pemberdayaan.....	15
2. Upaya dan kendala Pemberdayaan	29
3. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)	34
B. Kerangka Konseptual	47
III. METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	50
C. Jenis Data Penelitian	50
D. Informan Penelitian	51
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	52
F. Teknik Uji Keabsahan Data	53

G. Teknik Analisis Data.....	54
IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Temuan Umum	56
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	65
3. Gambaran Umum Pelaksanaan Program BLM-PUMP	70
B. Temuan Khusus	73
1. Pelaksanaan Program BLM-PUMP	73
2. Dampak Pelaksanaan Program BLM-PUMP.....	89
3. Kendala Pelaksanaan Program PUMP.....	94
4. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Program PUMP	106
C. Pembahasan.....	112
V. PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Masyarakat Miskin di Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.....	4
Tabel 2. Jenis Data Penelitian	50
Tabel 3. Informan Penelitian.....	52
Tabel 4. Distribusi Penduduk Kecamatan IV Jurai Menurut Nagari Tahun 2013.....	63
Tabel 5. Jumlah penduduk di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan.....	64
Tabel 6. Alat penangkap ikan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013.....	64
Tabel 7. Rincian penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Oleh Kelompok Nelayan di Kecamatan IV Jurai.....	82
Tabel 8. Jumlah Kelompok Penerima BLM – PUMP Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 –201.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	47
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	57
Gambar 3. Cool Box.....	86
Gambar 4. Perahu.....	87
Gambar 5. Mesin Robin.....	87
Gambar 6. Hasil tangkapan ikan.....	87
Gambar 7. Jalar.....	88
Gambar 8. Alat tangkapan ikan.....	89
Gambar 9. Spanduk sosialisasi/penyuluhan Program PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.....	101
Gambar 10. Suasana sosialisasi program PUMP yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan dihadiri oleh anggota kelompok nelayan.....	101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri atas 17.506 pulau dengan panjang pantai 81.000 Km. Luas perairan laut Indonesia sekitar 5,8 juta Km², yang terdiri atas 2,8 juta km² perairan teritorial 0,3 juta km² laut pedalaman dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksekutif. Dilihat dari rasio luas wilayah daratan Indonesia dengan luas wilayah laut, luas wilayah laut Indonesia mencapai tiga perempat bagian dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Sementara tingkat pemanfaatannya baru mencapai 57%. Bengen dan Rizal diacu dalam saefuddin dan Rizal (2002) menyatakan bahwa hingga saat ini diperkirakan lebih kurang 65% masyarakat Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan 2,8% diantaranya merupakan masyarakat nelayan. (Sumber :Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2007)

Masyarakat pesisir memiliki problem hidup dan ritme kehidupan yang khas selain dihadapkan pada keadaan alam yang keras, masyarakat pesisir yang umumnya didominasi oleh nelayan merupakan kelompok masyarakat yang masih berkuat dalam permasalahan di bidang ekonomi. Umumnya permasalahan hidup masyarakat pesisir berkisar dalam permodalan yang lemah, penghasilan yang tidak menentu karena hasil tangkapan yang berfluktuasi, dan posisi tawar yang lemah baik dalam hal pengadaan input produksi maupun output produksi.

(Sumber :Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2007).

Di bidang sumberdaya manusia, sampai saat ini sebagian besar usaha perikanan Indonesia masih terdiri dari usaha perikanan skala kecil yang dilakukan

oleh nelayan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah serta penguasaan sumberdaya, teknologi dan modal yang terbatas. Sebagian diantaranya masih berada di bawah garis kemiskinan, khususnya yang berstatus nelayan buruh. Hal itu dapat dilihat dari struktur armada penangkapan perikanan laut yang sebagian besar, yakni 60% terdiri dari perahu tanpa motor yang umumnya beroperasi pada daerah-daerah pantai seperti di pantai Utara Jawa-Selat Bali, Selat Malaka dan Pantai Barat Sulawesi Selatan (Sumber : Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2007).

Menurut Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil (2007), misi pembangunan perikanan adalah (a) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, (b) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, (c) peningkatan penyediaan bahan pangan sumber protein hewani dan bahan baku industri di dalam negeri serta ekspor, (d) penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi peran serta masyarakat dalam pengembangan perikanan, (f) pemulihan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, (g) peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan.

Kenyataan ini merupakan suatu potensi yang sangat besar bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat mensejahterakan rakyatnya dengan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Namun hal ini belum mampu untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan menjelma menjadi suatu daerah bahari yang besar dan mandiri, hal ini dibuktikan dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yang berprofesi sebagai nelayan masih cukup banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kondisi

seperti tersebut diatas baik secara struktural, kultural bahkan secara alamiah. Salah satu penyebab nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan, disamping banyak permasalahan lain seperti keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia. Inilah yang membuat penyebab kemiskinan nelayan menjadi sangat kompleks karenanya dibutuhkan strategi kebijakan pembangunan yang efektif dan komprehensif. Oleh karena itu perlu adanya perubahan paradigma dan praktek pembangunan kelautan dan perikanan dari yang semata – mata hanya mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunan yang dapat menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan bagi para pelaku pembangunan secara adil dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang.

Kehidupan masyarakat nelayan Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu faktor pendukung dalam keberlangsungan pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki namun hal tersebut tidak mendukung peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat nelayan. Dalam peningkatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan petugas dan masyarakat perlu mendapat perhatian, sehingga transmisi dan adopsi ilmu pengetahuan dan perlu bimbingan dan pembinaan dari penyuluh perikanan secara teratur dan berkesinambungan.

Kondisi Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2012 tercatat dalam Buku Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah nelayan secara keseluruhan adalah 20,288 jiwa, terbagi menjadi 2, yakni status nelayan penuh berjumlah 13.789 jiwa dan status nelayan sambilan berjumlah

5.125 jiwa. Jumlah Petani ikan sebanyak 1.374 jiwa. Sedangkan jumlah alat penangkapan ikan menurut jenis alat tangkap ikan menggunakan pukat kantong Payang sebanyak 225 buah, pukat pantai 238 buah, Jaring Insang hanyut 296 buah, jaring insang tetap 296 buah, trammel net sebanyak 215 buah, bagan menggunakan perahu sebanyak 68 buah, bagan mesin 190 buah, menggunakan alat pancing rawai tetap 31 buah, pancing tonda 205 buah, pancing lain 734 buah. Sedangkan nelayan yang menggunakan perahu/kapal untuk menangkap ikan ada beragam, diantaranya kapal jukung sebanyak 88 unit, perahu papan kecil 148 unit, perahu papan sedang 164 unit, perahu papan besar 87 unit, motor tempel 1.576 unit. (sumber : BPS kab. Pesisir Selatan, Tahun 2012)

Untuk melihat data masyarakat miskin di Kabupaten pesisir selatan khususnya di Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Masyarakat Miskin di Kecamatan IV Jurai
Kab. Pesisir Selatan

No	Nama Desa	Jumlah				Total
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rumah Tangga Miskin Lainnya	
1	Salido	13	24	85	246	368
2	Painan	31	53	120	277	481
3	Lumpo	42	97	258	615	1,012
4	Tambang	36	65	149	256	509
5	Bungo Pasang Salido	13	33	119	406	571
6	Sago Salido	12	15	66	160	253
		147	287	797	1,963	3,194

*Sumber:*BPS Kab. Pesisir Selatan. Tahun 2013

Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013, jumlah masyarakat yang miskin totalnya adalah 3,194 Masyarakat Miskin (tiga ribu seratus sembilan puluh empat)

yang terbagi atas empat kategori yaitu, Sangat Miskin (SM), Miskin (M), Hampir Miskin (HM), Rumah Tangga Miskin Lainnya (RML), dapat dilihat di Nagari Salido terdapat total Rumah Tangga Miskin adalah 368 Miskin, di Nagari Painan terdapat 481 Rumah Tangga Miskin, di Nagari Lumpo terdapat 1,012 Rumah Tangga Miskin, Nagari Tambang 509 Rumah Tangga Miskin, di Nagari Bungo Pasang Salido 571 Rumah Tangga Miskin, dan di Nagari Sago Salido terdapat 253 Rumah Tangga Miskin.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kesempatan kerja dan kemiskinan nelayan merupakan isu pokok yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif. Penerapan rajim terbuka (open acces) dalam pengelolaan sumber daya perikanan memungkinkan setiap orang dapat berpredikat sebagai nelayan meskipun sesungguhnya tidak memiliki pengalaman dan kecakapan sebagaimana layaknya seorang nelayan. Hal ini membawa berbagai implikasi antara lain seperti pertumbuhan jumlah nelayan, sulitnya proses pembinaan nelayan secara tepat sasaran dan eksploitasi sumber daya ikan secara tidak terkendali. Kondisi ini sangat mempengaruhi upaya peningkatan pendapatan nelayan dan keluarganya secara berkelanjutan, sehingga nelayan selalu masuk dalam kategori keluarga miskin.

Semakin berkembangnya populasi penduduk dan peningkatan kesadaran pemenuhan gizi makanan mengakibatkan peningkatan permintaan pasar ikan dalam dan luar negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak bisa hanya dipenuhi dari hasil perikanan tangkap yang hasilnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Akan tetapi perlu didukung dari usaha budidaya yang mulai

dirintis penerapannya di masyarakat melalui pembudidayaan ikan karena hal ini sangat didukung dengan potensi daerah yang dimiliki oleh daerah ini dimana hampir 76 % merupakan wilayah laut serta didukung dengan telah berkembangnya teknologi dalam kegiatan keramba jaring apung, rumput laut, tambak dan kolam air tawar. Pengembangan usaha perikanan baik penangkapan maupun budidaya perlu didukung oleh infrastruktur yang terpadu dan saling melengkapi. Pada usaha penangkapan sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti pabrik es, cold storage, pabrik pengolahan, pangkalan pendaratan ikan, laboratorium, pangkalan pembuatan dan perawatan kapal ikan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sedangkan usaha budidaya diperlukan lahan yang produktif, pabrik pakan (distributor), pabrik pengolahan, *hatchery* dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk pemenuhan berbagai infrastruktur tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kegiatan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dilandasi oleh Otonomisasi Daerah dengan diberikan kewenangan pada daerah untuk memanfaatkan dan mengelola kekayaan laut yang ada di daerah ini.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tetap dalam kemiskinannya.

Smith (2005 : 35) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai Negara Asia serta Anderson yang melakukannya di negara-negara Eropa

dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekakuan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan asset tersebut adalah karena sifat asset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas asset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi asset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Smith (2005 : 25) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahwa *opportunity cost* nelayan, khususnya dinegara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Panayotou(2002 : 21) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Panayotou ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

Kusnadi (2009 : 10) mengidentifikasi sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan nelayan:

- a. Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan.
- b. Menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingga aktivitas social ekonomi perikanan di desa-desa nelayan berlangsung terus.
- c. Masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi melambatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan.
- d. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya.

- e. Adanya relasi sosial ekonomi "*eksploitatif*" dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan.
- f. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup
- g. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka
- h. Lemah karsa.

Selanjutnya masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah 1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, 2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, 3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, 5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan 6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi 2009 : 10).

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya

untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan kabupaten kota untuk mengelola sumberdaya wilayah laut sepertiga dari kewenangan provinsi 12 mil yang meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya alam dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Pengelolaan kawasan konservasi telah ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Berlembaga atau berkelompok merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi maupun status sosial. Menurut Kusnadi (2009 : 32-33) berlembaga atau berorganisasi dapat 1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat, 2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi dan kebijakan, 3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan 4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu tempat pelaksanaan kegiatan program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLM PUMP) yang menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sektor andalan di dalam pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan survei Dirtjen Perikanan Tangkap, sektor kelautan dan perikanan Kabupaten

Pesisir Selatan memiliki potensi lestari rata-rata 94.864 ton per tahun. Dengan Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak 2,531 RTP, dengan jumlah nelayan pada tahun 2012 sebesar 20,288 jiwa, jumlah alat penangkapan ikan 2,719 buah, tingkat produksi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 31,880.7 ton dari potensi lahan yang dimiliki oleh kabupaten ini.

(Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002)

Permasalahan nelayan memang sangat komplit, hal ini akan dapat diatasi apabila pelaksanaan program – program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat nelayan dapat mengayomi, mengajak, memfasilitasi dengan program-program yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan.

Dengan potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan di wilayah pesisir yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, dan didukung melalui program BLM PUMP oleh Pemerintah, diharapkan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di daerah tersebut dapat terjawab. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan program BLM PUMP yang di laksanakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan maka dilakukan penelitian ini.

Dengan melihat latar belakang seperti disebutkan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLM-PUMP) dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.”**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa persoalan dalam Pelaksanaan Program BLM-PUMP dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan:

- a) Kurangnya sarana dan prasarana masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan IV Jurai sehingga menyebabkan keterbatasan hasil tangkapan ikan yang didapat.
- b) Keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia masyarakat nelayan dalam memberdayakan dirinya sendiri.
- c) Kurangnya kesempatan kerja masyarakat nelayan sehingga menjadi salah satu penyebab kemiskinan nelayan.
- d) Keterbatasan alat tangkapan masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan ke tengah laut.

C. Batasan Masalah.

Program BLM-PUMP memiliki 3 (tiga) bidang, yaitu: Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan. Batasan dalam masalah penelitian ini adalah melihat bagaimana Pelaksanaan Program BLM-PUMP dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, di bidang Perikanan Tangkap.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana pelaksanaan Program BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
- b) Bagaimana dampak pelaksanaan Program BLM-PUMP terhadap masyarakat nelayan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
- c) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan program BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
- d) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah tersebut dalam pelaksanaan program BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Fokus Penelitian.

Dengan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan data lapangan, maka penulis membatasi fokus penelitian ini tentang bagaimana sebenarnya Pelaksanaan BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. bagaimana pelaksanaannya, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan program tersebut.

F. Tujuan Penelitian.

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Mengetahui dampak dari pelaksanaan BLM-PUMP terhadap masyarakat nelayan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- c) Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- d) Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Program BLM-PUMP di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Manfaat penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a) Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang manajemen keuangan.
- b) Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi perusahaan dalam mengidentifikasi variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan nelayan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- c) Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti lanjutan yang berkaitan dengan BLM-PUMP kedepannya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep pemberdayaan

Menurut Syarif Makmur (2008 : 171) pemberdayaan merujuk kepada 2 kecenderungan (1) proses pemberdayaan yang berorientasi kepada proses dalam memberikan kekuatan dan kemampuan agar seseorang lebih menjadi berdaya (2) pemberdayaan cenderung kepada pemberian motivasi / dorongan kepada individu dalam menentukan hidupnya.

Menurut Rondineli dalam Soetomo (2006 : 322) bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai suatu konsep dalam pembangunan dan pemberdayaan oleh para pemikir-pemikir di negara-negara berkembang mengatakan bahwa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi tujuan utama, hal yang paling mendesak adalah (1) menciptakan lapangan kerja, (2) mendorong perkembangan sosial, (3) merata kembali perekonomian nasional guna memperkecil ketimpangan pendapatan.

Konsep pemberdayaan menurut Edi Suharto (2010 : 58) mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk kepada bagaimana kemampuan seseorang yang ditujukan kepada kelompok rentan dan kelompok lemah sehingga mereka bisa memiliki kemampuan dan kekuatan dalam (a) mereka memiliki kebebasan yang mencakup segala hal yaitu bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dalam memperoleh kesehatan (b)

mendapatkan sumber-sumber produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (1998 : 22) bahwa pembangunan dalam suatu bangsa itu harus ada dua aspek pokok yaitu : (a) sumber daya manusia, (b) sumber daya alam, lalu soekidjo mengatakan bahwa antara kedua komponen tersebut sumber daya manusia merupakan komponen yang paling terpenting. Sumber daya manusia juga memiliki 2 aspek yaitu : aspek fisik dan aspek non-fisik yang menyangkut kemampuan berfikir, kemampuan bekerja dan keterampilan-keterampilan. Dalam mengembangkan sumber daya manusia harus ada hal-hal yang harus dipenuhi antara lain :

1. Kebutuhan Fisiologis, menyangkut tentang kebutuhan pokok yang bersifat fisik, kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman yang sehat.
2. Kebutuhan jaminan keamanan, meliputi manusia itu ingin bebas dari ancaman, maka dari itu Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman tersebut.
3. Kebutuhan yang bersifat pengakuan atau penghargaan, manusia itu memiliki hakikat yang bahwa mereka butuh dihargai (harga diri).

Pemberdayaan adalah menjadikan sesuatu yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya sehingga mempunyai kekuatan dan kemampuan . Khususnya masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat nelayan permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sulit untuk di selesaikan seperti kesehatan, gizi, ekonomi dan tenaga kerja.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan untuk memperkuat atau memberikan keberadaan pada sebuah kelompok atau individu individu yang tidak berdaya sehingga mengalami keterbelakangan, dan kemiskinan sehingga dalam mewujudkan sebuah pemberdayaan harus merujuk kepada hasil dalam mencapai sebuah perubahan sosial yang lebih baik dari sebelumnya.

Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam melakukan pemberdayaan ada hal yang harus dibangun dari manusia itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kuliatasnya agar manusia itu menjadi manusia pembangunan ada beberapa ciri manusia pembangunan menurut Soelo Soernadjan dalam Desive Zuraida dkk (1993 : 34) yaitu :

1. Manusia itu tidak boleh menyerah terhadap nasib. Manusia itu harus memiliki kepercayaan untuk membangun dirinya sendiri sehingga tidak pasif dalam memperbaiki nasibnya sendiri.
2. Manusia pembangunan memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib, sehingga ia mampu mengatur dan memperbaiki nasibnya sendiri.
3. Manusia pembangunan memiliki watak yang dinamis sehingga dia (a) pandaimemanfaatkan setiap kesempatan yang menguntungkan dirinya (b) mampu memecahkan setiap persoalan hidup yang dihadapinya (c) selalu siap menghadapi setiap perubahan-perubahan sosial budaya.
4. Antara manusia yang satu dengan manusia lain melakukan kerja sama atas dasar penghormatan hak dan kewajiban.

5. Manusia pembangunan memiliki watak yang bermoral tinggi, dengan moral yang tinggi ia mampu menepati janji peka terhadap hak dan kepentingan orang lain

Strategi yang lebih

efektif dalam pembangunan sebagai sebuah wujud dalam pemberdayaan sebaiknya lebih diprioritaskan kepada tujuan dalam memenuhi kebutuhan pokok sebab kebutuhan pokok adalah sebagai suatu komponen yang dianggap oleh masyarakat adalah hal yang sangat perlu tersedia oleh setiap orang.

Menurut Pudjiwati Sagjogyo (1983 :7) ada beberapa pendekatan sumber daya manusia dalam memperhatikan pembangunan sosial ekonomi dengan memperhatikan beberapa aspek :

1. Bagaimana meningkatkan mutu sumber daya manusia manusia itu: tingkat pendidikan (pendidikan formal, non formal dan juga informal) tingkat kesehatan gizi, apresiasi terhadap berfikir rasional dan disiplin kerja.
2. Bagaimana mengembangkan penggunaan sumber daya manusia itu dengan memperbesar kesempatan bekerja memperbaiki upah, memperbaiki perlindungan kerja.
3. Bagaimana mengembangkan orientasi kelembagaan yang mendukung usaha pembangunan baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintahan.

Menurut Mulyadi S (2003 : 22-23) mengatakan ada beberapa kebijakan yang bisa diterapkan dalam konsep pemberdayaan dan pembangunan antara lain :

1. Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa akan datang, sehingga mampu menjawab perkembangan zaman dan permintaan pasar kerja sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan.
2. Menanamkan budaya hidup sehat, memberikan perhatian, serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk miskin dan daerah terpencil.
3. Memberikan keterampilan kepada masyarakat miskin, menumbuhkan sikap produktif, serta mendorong semangat gotong royong dan kemandirian sehingga mampu melepaskan diri dari kemiskinan.
4. Mendukung program keluarga berencana sehingga mampu menekan laju pertumbuhan penduduk agar tercapainya keseimbangan kepadatan penduduk.

Menurut The Kian Wie (1981 : 30) bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan dalam perencanaan pembangunan ada beberapa pendekatan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu:

1. Mencakup kebutuhan konsumsi perorangan (personal consumption item) seperti pangan, sandang , dan konsumen.

2. Menyangkut tentang perencanaan umum yang mendasar seperti : fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan dan kebudayaan.
3. Hak atas pekerjaan produktif sehingga memberikan imbalan yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri atau rumah tangganya.
4. Prasarana yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup.
5. Partisipasi seluruh penduduk yang meliputi dalam pengambilan keputusan dalam program-program penyediaan barang-barang dan jasa.

Pembangunan menurut Yayasan SPES (1992 : 17-18) pembangunan adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sekaligus sumber daya alam dengan menyerasikan sumber daya tersebut dengan manusia dalam pembangunan. Ada beberapa asumsi dasar yang memahami dari konsep ini :

1. Sebuah pembangunan harus berkelanjutan secara terus menerus sehingga prosesnya berkembang secara berkelanjutan.
2. Sumber daya alam dalam penggunaannya akan semakin habis sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam.
3. Lingkungan harus serasi dengan kualitas hidup yang antara lain tergambar dengan kualitas hidup sehingga dapat menurunkan tingkat kematian dan harapan usia hidup.
4. Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas trans generasi.

b. Pengertian Masyarakat, Pemberdayaan Dan Nelayan

1) Definisi Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Menurut Selo Sumardjan (2004 : 65) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dan menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

Soerjono Soekanto(2002 : 45) alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

- a) Beranggotakan minimal dua orang.
- b) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- c) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota.

- d) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa defenisi masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia yang memiliki 4 unsur dan 4 kriteria.

Jika dihubungkan dengan nelayan masyarakat yang mencari ikan merupakan pencaharian hidup manusia yang sudah tua sekali. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan ini biasanya adalah masyarakat yang hidupnya dekat laut, sungai maupun danau. Pendek kata, masyarakat nelayan atau yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakat yang hidup dekat air. Air itulah yang digunakan sebagai sumber penghasilan atau penghidupan kesehariannya. Dalam kenyataannya, ada kalanya seseorang menjadikan aktifitas menangkap ikan sebagai mata pencaharian pokok dan ada pula yang hanya dijadikan sebagai kegiatan tambahan yang memungkinkannya bisa meningkatkan pendapatan untuk menopang hidup dan terpenuhinya yang dibutuhkannya. Masyarakat nelayan (*Fisher Society*) dalam hal ini bukan hanya mereka yang dalam mengatur hidup dan kehidupannya hanya bertarung-berperang melawan benturan-benturan badai siang dan malam hari, hanya sekedar mencari sesuap yang bisa menghidupi keluarganya. Mengingat manusia hidup ditengah-tengah masyarakat, bukan hidup ditengah hutan, yang mana faktor lingkungan besarsekali

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat. Masyarakat nelayan merupakan bagian dari masyarakat daerah, artinya adalah masyarakat yang mendiami daerah tertentu, berinteraksi memakai pola dari sistem budaya yang sama, dan diikuti oleh adat istiadat yang disepakati bersama. Sehingga masyarakat nelayan dapat dikatakan masyarakat yang dalam kehidupannya bersifat homogen. Dalam artian tidak terlalu banyak variasi dalam bidang-bidang kehidupannya. Kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan yang sifatnya tradisional, dengan menggunakan perahu sampan dan dayung, mereka harus mendayung sampan ketengah laut yang tidak terlepas oleh benturan badai lautan. Memang kebanyakan orang-orang atau masyarakat nelayan yang mendiami pesisir memilih penghidupan sebagai nelayan, ini sebagian besar adalah merupakan suatu penghidupan atau mata pencaharian yang turun-temurun sejak dari nenek moyang.

2) Definisi Pemberdayaan

Merujuk pengertian pemberdayaan menurut Edi Suharto (2010 : 58) mengatakan bahwa pemberdayaan merujuk kepada bagaimana kemampuan seseorang yang ditujukan kepada kelompok rentan dan kelompok lemah sehingga mereka bisa memiliki kemampuan dan ketahanan dalam (a) mereka memiliki kebebasan yang mencakup segala hal yaitu bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dalam memperoleh kesehatan (b) mendapatkan sumber - sumber produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.

Jika dihubungkan dengan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan dapat disimpulkan bahwa untuk pemberdayaan terhadap nelayan yaitu memberikan modal kemampuan agar masyarakat dapat mampu memberdayakan dirinya sendiri, dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada, juga pemberdayaan masyarakat nelayan untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan mendapatkan untuk dapat bangkit dan mampu bersaing dengan daerah yang ada di perkotaan.

3) Definisi Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam perstatistikan kelautan dan perikanan, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan dari perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nelayan (Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002).

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan definisi untuk Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT). (Sumber : Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan).

Menurut Subri (2005 : 37 -38) nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh

adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan Perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Sumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah, kemampuan manajemen yang terbatas. Taraf hidup penduduk desa pantai yang Sumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah, kemampuan manajemen yang terbatas. Taraf hidup penduduk desa pantai yang sebagian besar nelayan sampai saat ini masih rendah, pendapatan tidak menentu (sangat tergantung pada musim ikan), kebanyakan masih memakai peralatan tradisional dan masih sukar menjauhkan diri dari perilaku boros. (Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002).

Bahkan dengan mendefinisikan nelayan, justru tidak bisa sesederhana itu karena banyaknya problema yang saling kait mengkait antara lain, kondisi geografis sang nelayan, keterampilan, modal dan ketakberdayaan ekonomi seharusnya menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pendefinisian nelayan. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, modal, keterampilan misalnya tidak mutlak menjadikan nelayan kecil harus menggunakan kapal dalam kegiatan penangkapan ikan. Bagaimana dengan nelayan yang menangkap ikan hanya dengan sampan kecil, atau hanya menebar jalar di pinggir pantai, mancing di pinggir pantai, atau juga apakah orang yang menangkap sesuatu selain ikan di laut tidak bisa di anggap sebagai nelayan seperti definisi nelayan dalam Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberi definisi nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Disini nelayan yang saya maksud adalah nelayan tradisional yang mana Penyebutan yang tepat menurut saya justru adalah Nelayan Tradisional, yaitu orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan berbagai alat tangkap yang masih tradisional yang mata pencahariannya mengandalkan hasil laut. Sebagian besar nelayan di Indonesia justru berada dalam posisi sebagai nelayan tradisional dan para nelayan tradisional inilah yang justru berada dalam lingkaran garis kemiskinan. Terkadang karena himpitan ekonomi posisi para nelayan tradisional ini berubah menjadi nelayan buruh yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan, bagan, usaha budidaya (tambak, budidaya ikan) yang menjadikan kondisi kemiskinan mereka semakin parah dan justru komunitas nelayan tradisional inilah yang seharusnya lebih banyak di selesaikan oleh Pemerintah sesuai dengan pernyataan menteri kelautan dan perikanan seperti pada awal tulisan ini. Karena kalau tidak, maka undang-undang tersebut yang merupakan kebijakan negara akan mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dan atau terjadinya kemiskinan struktural.

Secara sederhana, kemiskinan itu bisa dikategorikan atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu kemiskinan temporer (*temporary poverty*) serta kemiskinan struktural (*structural poverty*). Jika dirincikan lagi, kemiskinan temporer ini adalah kemiskinan yang sifatnya sementara di mana suatu kali dia miskin, suatu kali bisa melewati batas kemiskinan ke tahap sejahtera (walaupun mungkin tahap paling awal di kelompok sejahtera). Intinya, kelompok yang masuk ke dalam kategori

kemiskinan temporer ini masih memiliki peluang untuk masuk ke wilayah sejahtera walaupun tingkat sejahtera yang paling rendah.

Lalu bagaimana dengan teori kemiskinan structural, yang sepintas horor jika menyebutnya berkali-kali, meski sebenarnya ini yang harus menjadi perhatian khusus. Secara harfiah, kemiskinan struktural ini adalah suatu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari garis kemiskinan, bahkan juga anak-anaknya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, dan bisa dikatakan mengalami kemiskinan abadi. Bayangkan, jika seorang nelayan miskin tidak memiliki biaya untuk memberikan gizi yang cukup pada anak-anak mereka, yang lebih dari satu jumlahnya. Masalahnya tidak akan sesederhana ini, dampaknya selain terganggunya kesehatan mereka, juga akan menurunkan tingkat kecerdasan berfikir dan emosinya. Lalu ketika mereka besar, karena tak bisa merasakan pendidikan yang normal di bangku sekolah, bisa jadi mereka akan terus berada dari lintasan kebodohan dan kemiskinan, dan bisa jadi akan stay dan terjebak ke dalam kemiskinan bahkan sampai ke anak-anaknya.

Sekedar diketahui, secara teoritis, paling tidak ada 2 (dua) hal yang membuat anak tidak cerdas, yaitu (1) gizi yang baik semasa balita, serta (2) pendidikan yang memadai. Kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat nelayan, bisa kita petakan dalam dua paradigma sederhana; normatif-teologis dan struktural-sosiologis. Paradigma pertama berangkat dari asumsi bahwa miskin-kayanya atau susah-senangnya seseorang sudah menjadi suratan takdir Yang Maha Kuasa.

Kemiskinan yang melanda masyarakat nelayan dianggap sebagai takdir Ilahi dan karenanya banyak orang yang berpangku tangan hanya bergantung pada nasib. Mereka tidak mau berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika menemui kegagalan, mereka juga mudah menyerah. Sedang paradigma kedua, yaitu struktural-sosiologis, berasumsi bahwa kemiskinan yang menimpa masyarakat nelayan disebabkan oleh sistem atau struktur politik yang cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan perekonomian yang diterapkan Pemerintah hanya berorientasi para pemilik modal sehingga yang kaya menjadi semakin leluasa mengendalikan pasar, yang miskin semakin terhimpit dan tertindas. Jika kedua paradigma itu digabungkan, maka masyarakat nelayan miskin itu tidak hanya karena nasib, tetapi juga ada faktor luar, yaitu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Jika ada nelayan yang merasa telah berusaha maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap dalam kondisi memprihatinkan, ini tidak berarti semata-mata karena suratan takdir, tetapi ada yang tidak beres dalam sistem dan kebijakan perekonomian. Apakah itu karena monopoli, atau praktik-praktik korupsi dan kolusi. Berbagai penyelewengan dan kejahatan pun berlangsung secara sistematis sehingga tidak tampak pelaku sebenarnya. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi: satu sama lain saling menikmati, saling menutupi dan saling menyelematkan.

Kondisi kemiskinan struktural ini terjadi di hampir semua kampung nelayan yang ada di Indonesia dan pembiaran terhadap kondisi ini merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimana negara harus bertanggungjawab apalagi negara

(Pemerintah) telah diamanatkan di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang - Undang Dasar tahun 1945.

4) Karakteristik Masyarakat Nelayan

Nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Disini tidak ada pretensi untuk selalu membentuk koperasi nelayan karena apapun bentuk organisasi yang ada, jaminan kepentingan sosial ekonomi nelayan adalah hal paling penting. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi institusi alternatif, selain institusi patron klien seperti yang selama ini telah mengakar (Satria 2002 : 22).

Dalam pemberdayaan nelayan secara struktural maupun kultural, perludipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Namun bentuk-bentuk pendekatan yang unik tersebut pun tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks kehidupan nelayan, pengetahuan modern yang kita miliki seringkali dianggap segala-galanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan teknis dan sosial yang dihadapi nelayan, padahal nelayan memiliki sistem pengetahuan tersendiri yang penting dijadikan bahan atau bekal bagi pemberdayaan.

2. Upaya dan kendala Pemberdayaan Masyarakat

a. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita dalam Sumaryadi (2005:150) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) fase:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, kondisi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan fasilitas yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat yang paling bawah.
- 3) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan masyarakat harus dicegah jangan sampai lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat harus melindungi masyarakat yang lemah, agar yang lemah jangan tertindas oleh orang yang kuat terpinggirkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu pemihakan/perlindungan terhadap yang lemah amat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat di Nagari prioritas pada mengemukakan bahwa strategi yang di gunakan dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan berbagai sektor yang berfungsi memberdayakan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan dan mengutamakan peran aktif masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran wirausaha sebagai pelaku ekonomi dan menggerakkan roda perekonomian.
- 4) Mendorong pengusaha skala menengah dan besar untuk membantu wirausaha kecil atau ekonomi mikro dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil melalui berbagai pola yang sesuai.
- 5) Mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat lokal untuk mempercepat proses modernisasi di bidang ekonomi, teknologi, pelestarian budaya minang kabau dan budaya lain. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta solidaritas sosial masyarakat setempat.
- 6) Menumbuh kembangkan usaha-usaha masyarakat yang sudah ada agar mampu bersaing dalam era globalisasi saat ini. (Sumber : Pergub Sumbar Nomor 66 Tahun 2005)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memandirikan masyarakat serta meningkatkan kesadaran untuk maju dan berkembang sehingga dapat terlibat dalam pembangunan , agar dapat bersaing dengan perkembangan masa.

b. Kendala Pemberdayaan Masyarakat :

Kartasmita dalam Sumaryadi (2005:65) mengemukakan Hal-hal yang merupakan kendalaterhadap pengembangan atau pelaksanaan kebijakan yang mendukung atau memampukan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu : a) Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh, b) Hambatan Kebijakan Keuangan, c) Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi, d) Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa, e) Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum. Berikut penjelasannya :

- a) Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh.

Walaupun sebagian besar pemegang kendali, termasuk penyusun kebijakan, dapat mendukung dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat dan memiliki pemahaman yang umum tentang persyaratannya, namun pembuat keputusan dapat kembali kependekatan top-down. Hal ini bisa terjadi karena kurang memahami bagaimana memberdayakan masyarakat, atau sudah memahami tetapi pada saat dimana terasa ada krisis dan/atau tekanan sulit dilakukan.

- b) Hambatan Kebijakan Keuangan

Kekakuan sistem penganggaran proyek serta sistim pengawasan keuangan negara yang sangat kurang fleksibilitasnya dan lebih berfokus pada aspek administrasi dan pencapaian target fisik semata tanpa melihat proses yang terjadi. Selain itu pula, kelompok masyarakat kurang mengontrol penggunaan dana-dana pusat (DIP sektoral) dan dana transfer (seperti Inpres). Mungkin tidak cukup

dukungan keuangan bagi Pemberdayaan Masyarakat dari sumber-sumber daya lokal, baik disebabkan oleh rendahnya tingkat pemungutan pajak, rendahnya tingkat pengendalian 'dana hibah' dari pusat atau rendahnya tingkat komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumberdaya pemerintah setempat bagi usaha Pemberdayaan Masyarakat. Sumberdaya masyarakat sendiri dapat digerakkan sampai ke tingkat tertentu tapi nampaknya akan membuktikan rendahnya kualitas penanganan input dan dukungan.

- c) Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi.

Ada kecenderungan dari program-program Pemberdayaan Masyarakat untuk melupakan bahwa perubahan-perubahan di tingkat lokal itu jauh lebih mudah diperkenalkan, dan bahwa resistensi (penolakan) di tingkat yang lebih tinggi akan lebih besar sampai tingkat pemahaman dan komitmen yang tulus untuk berubah dapat diperkenalkan kepada penyusun kebijakan.

- d) Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa

Ada keprihatinan bahwa kebijakan yang dikembangkan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat tidak akan cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi geografis, tingkat ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Harus diperhatikan bahwa kebijakan yang memungkinkan, tetapi tidak menghalangi proses adaptasi yang dibutuhkan untuk memastikan strategi Pemberdayaan Masyarakat yang tepat, diteruskan di tingkat lokal.

e) Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum

Sistem perencanaan dan kepemimpinan pembangunan yang terpusat selama tiga puluh dua tahun, telah melahirkan tenaga pelayanan umum tingkat lapangan yang terbiasa mengikuti instruksi dari pusat. Akibatnya mereka tidak terlatih untuk mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi serta merubah suatu proyek di tingkat daerah. Inovasi dan pengambilan keputusan oleh staf tingkat lapangan tidak pernah dihargai; sehingga mereka mengalami kesulitan berperan sebagai fasilitator dalam kelompok masyarakat, yang kemudian mempromosikan dan mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan.

3. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

Menurut Keputusan Direktur Jenderal perikanan Tangkap Nomor KEP.15/DJ-PT/2011, Tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam rangka pelaksanaan PUMP. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan. Berikut adalah penjelasan mengenai pelaksanaan program PUMP, Sosialisasi PUMP, Pengembalian Pinjaman dalam Pelaksanaan Program PUMP tersebut, dan pemanfaatan bantuan PUMP.

a. Pedoman PUMP

Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Oleh karena itu mulai tahun 2011 kegiatan pemberdayaan nelayan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai kelanjutan pembinaan nelayan penerima BLM pada kegiatan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan tahun 2009-2010 yang dalam hal ini dilaksanakan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan. Pelaksanaan PUMP Perikanan Tangkap kedepan menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya pemberdayaan usaha nelayan skala kecil berbasis desa nelayan.

Tujuan PUMP adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di perdesaan sesuai dengan potensi sumberdaya ikan.
- 2) Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di perdesaan;
- 3) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan output:

- 1) Tersalurkannya danaBLMPUMP kepada KUB (kelompok usaha bersama) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif penangkapan ikan.
- 2) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola KUB melalui pendampingan.

Indikator keberhasilan outcome:

- 1) Meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB dalam berusaha sesuai dengan potensi sumberdaya ikan.

- 2) Berkembangnya kewirausahaan KUB.

Sedangkan Indicator benefit dan Impact antara lain:

- 1) Berkembangnya usaha penangkapan ikan di lokasi PUMP.
- 2) Berfungsinya KUB sebagai lembaga ekonomi nelayan di lokasi PUMP.
- 3) Berkurangnya jumlah nelayan miskin di lokasi PUMP.

Ruang lingkup kegiatan PUMP meliputi:

- 1) Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan.
- 2) Identifikasi, seleksi, verifikasi dan penetapan calon KUB penerima BLM.
- 3) Rekrutmen tenaga pendamping.
- 4) Pelatihan, Tenaga Pendamping.
- 5) Penyusunan dan Pengusulan RUB dan dokumen administrasi.
- 6) Penyaluran BLM.
- 7) Pendampingan.
- 8) Pembinaan dan pengendalian.
- 9) Pemantauan dan evaluasi.
- 10) Pelaporan.

Penentuan KUB Calon Penerima BLM KUB calon penerima dana BLM diprioritaskan Kelompok Nelayan Penerima BLM PNPM Mandiri Kelautan Perikanan TA. 2009/2010, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Beranggotakan minimal 10 orang yang memiliki usaha pokok penangkapan ikan.
- b. Kelembagaan dan usaha masih aktif;

- c. Pengurus KUB adalah nelayan dan bukan PNS dan/atau aparat Desa/Kelurahan.
- d. Berdomisili di desa setempat.

Pada setiap Kabupaten/Kota lokasi PUMP, ditetapkan 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) KUB Perikanan Tangkap penerima dana BLM (dalam 1 (satu) desa/kelurahan maksimal 3 (tiga) KUB calon penerima BLM). KUB yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM harus mengisi formulir usulan yang diketahui oleh Tenaga Pendamping.

Tahapan Pengusulan KUB Calon Penerima BLM

- 1) Dinas Kabupaten/Kota dibantu tenaga pendamping melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi KUB calon penerima BLM dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan.
- 2) Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan KUB calon penerima BLM ke Dinas Provinsi, tembusan kepada Direktur Jenderal.
- 3) Dinas Provinsi setelah check list dokumen melakukan rekapitulasi dan mengusulkan calon penerima BLM kepada Direktur Jenderal.
- 4) Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Provinsi, Pokja Perikanan Tangkap melakukan verifikasi dokumen KUB calon penerima BLM PUMP.
- 5) Pokja Perikanan Tangkap melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap seluruh usulan dari Kepala Dinas Provinsi.

Penetapan KUB Penerima BLM PUMP Berdasarkan usulan yang telah diverifikasi oleh Pokja Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal mengusulkan KUB

calon penerima BLM kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Penetapan Tenaga Pendamping PUMP Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian/pendidikan di bidang perikanan dan berpengalaman dalam pembinaan kelompok nelayan sebagai penyuluh PNS/ swasta/swadaya. Tenaga Pendamping tinggal di lokasi penerima BLM-PUMP dan mendampingi KUB secara terus menerus selama berlangsungnya PUMP. Tenaga Pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, diprioritaskan direkrut dari Tenaga Pendamping PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan tahun 2009/2010.

b. Pedoman penyaluran

Pengesahan RUB (Rencana Usaha Bersama)

- a) RUB disahkan melalui musyawarah/rapat anggota
- b) RUB ditandatangani oleh Ketua KUB dan persetujuan Ketua atau sekretaris Tim Teknis sebagai dokumen PUMP
- c) RUB dan dokumen administrasi pendukung dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) untuk Tim Teknis dan 1 (satu) untuk Pokja Perikanan Tangkap meliputi : Nama KUB, nomor rekening KUB, Perjanjian Kerjasama (PK), Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai Rp. 6.000,-, Pakta integritas, dan Kuitansi/bukti pembayaran bermeterai Rp. 6.000, diverifikasi oleh Tim Teknis dan dituangkan dalam BA (Formulir 5). RUB dan dokumen administrasi pendukung yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis dan

dinyatakan memenuhi syarat (lengkap dan benar) selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen.

Dokumen Administrasi Pendukung Penyaluran Dana BLM PUMP

1. Administrasi pendukung Penyaluran Dana BLM PUMP disiapkan oleh KUB calon penerima BLM PUMP dibantu Tenaga Pendamping meliputi :
 - a. Usulan KUB menjadi penerima BLM PUMP (Formulir 1).
 - b. Nomor rekening bank aktif atas nama KUB
 - c. Perjanjian Kerjasama (PK) antara KUB dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh Ketua KUB bermeterai Rp. 6.000,- (Fomulir 7)
 - d. Surat Perintah Kerja (SPK) PPK Satker Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan kepada KUB ditandatangani oleh Ketua KUB bermeterai Rp. 6.000,- (Fomulir 8);
 - e. Berita Acara (BA) Serah Terima Uang ditandatangani oleh Ketua KUB (Fomulir 9);
 - f. Pakta Integritas (PI) yang ditandatangani oleh Ketua KUB (Fomulir 10);
 - g. Kuitansi ditandatangani oleh Ketua KUB dan diketahui oleh Tim Teknis senilai dana BLM PUMP yang diterima oleh KUB bermeterai Rp.6.000,- (Fomulir 11); h.RUB KUB yang ditandatangani Ketua KUB, disetujui oleh Tim Teknis (Formulir 2); i.Fotocopy KTP (Ketua dan Bendahara) dan fotocopy buku tabungan KUB.
2. Administrasi pendukung yang disiapkan oleh Tim Teknis dan Tim Pembina meliputi:

- a. Data rekapitulasi RUB KUB (Fomulir 3, dan 4);
- b. Berita Acara (BA) verifikasi dokumen administrasi pencairan dana BLM PUMP (Fomulir 5, dan 6).

Verifikasi Dokumen KUB

1. Verifikasi terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya dilakukan oleh Tim Teknis antara lain meliputi :
 - a. RUB dan dokumen lainnya ditandatangani Ketua KUB dengan stempel KUB (apabila KUB tidak mempunyai stempel maka RUB dan dokumen lainnya tidak distempel);
 - b. Nama rekening harus atas nama KUB yang dibuka oleh ketua dan bendahara. Penulisan alamat kantor cabang dan atau unit bank harus jelas serta nomor rekening tidak boleh salah;
 - c. Penjumlahan dana BLM PUMP dalam RUB tidak melebihi total bantuan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Pembetulan tulisan dan/atau angka yang salah dalam RUB dan dokumen administrasi dapat dicoret ditempat yang salah kemudian ditulis perbaikan dan dibubuhi paraf;
 - e. Kuitansi pembayaran dana BLM PUMP tidak diperkenankan ada kesalahan;
 - f. Dokumen administrasi lainnya (PK, SPK, BA, Kuitansi, dan PI) diisi dan ditandatangani oleh Ketua KUB;
 - g. RUB dan dokumen administrasi lainnya diajukan kepada Tim Teknis untuk memperoleh persetujuan;

- h. Tim Teknis membuat berita acara pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi RUB KUB;
- i. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada KUB melalui Tenaga Pendamping untuk diperbaiki;
- j. RUB yang sudah disetujui oleh Tim Teknis beserta dokumen pendukung lainnya dibuat rekapitulasi dokumen (softcopy dan hardcopy) bersama berita acara verifikasi dikirim kepada Tim Pembina.

Proses penyiapan penyaluran dana BLM.

- a. Melakukan proses penyaluran dana BLM kepada KUB melalui PPTK sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.
- b. Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening KUB;
- c. PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai Rp. 6.000,- kepada KUB;
- d. PPTK mengajukan Surat Permohonan Pembayaran langsung
- e. (SPP-LS) kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM; Pejabat Penguji/Penandatangan SPM mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dengan melampirkan :
- f. Ringkasan atau resume surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPTK;

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh PPTK atas nama KPA (Form 12);
- h. Rekapitulasi pembayaran kepada KUB penerima dana BLM PUMP yang ditandatangani oleh KPA dan diketahui oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- i. Ringkasan Keputusan Menteri tentang Penetapan KUB Penerima dana BLM PUMP;
- j. Berdasarkan SPM-LS, KPPN Jakarta I menerbitkan SP2D ke rekening KUB melalui Bank Operasional KPPN sesuai ketentuan berlaku.

c. Pengembalian Pinjaman PUMP

Nelayan yang menerima bantuan wajib mengembalikan pinjaman tersebut kepada PUMP dengan cara mencicil setiap hari/ setiap pulang melaut , sampai pinjaman nelayan dinyatakan lunas oleh pihak PUMP, yaitu sejumlah pokok pinjaman ditambah dengan jasa sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari nilai pokok pinjaman. Besarnya jumlah cicilan setiap hari/ setiap pulang melaut adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai total penjualan hasil tangkapan. Minimal masyarakat nelayan harus melunasi 75 % dari Pinjaman yang diberikan.

d. Pemanfaatan bantuan PUMP

Dana BLM PUMP dimanfaatkan sebagai modal usaha anggota KUB sesuai dengan RUB, dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus KUB. Prosedur penarikan dana BLM dan pemanfaatannya sebagai berikut.

1) Prosedur Penarikan Dana BLM-PUMP

- a) Pengurus KUB menginformasikan kepada seluruh anggota bahwa dana PUMP telah masuk ke rekening KUB.

- b) Pengurus KUB meminta kepada seluruh anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan RUB.
- c) Penarikan dana BLM dari Kantor Bank Cabang/Unit Bank Penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang disepakati pada Rapat Anggota.
- d) Penarikan dana BLM PUMP harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara serta dilaporkan kepada Tim Teknis.
- e) Dana BLM PUMP disalurkan kepada anggota sesuai RUB, dikelola dengan baik oleh pengurus KUB agar berkelanjutan.

2) Prosedur Pemanfaatan Dana BLM-PUMP

- a) Dana BLM dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif sesuai RUB.
- b) Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara.
- c) Dana BLM harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh KUB sebagai modal dasar Unit Usaha simpan pinjam, untuk selanjutnya dikembangkan oleh pengurus KUB menjadi Lembaga Keuangan Mikro dan/ atau koperasi.

e. Tenaga Pendamping TPD BLM-PUMP

Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian/pendidikan di bidang perikanan dan berpengalaman dalam pembinaan kelompok nelayan sebagai penyuluh PNS/ swasta/swadaya. Tenaga Pendamping tinggal di lokasi penerima BLM-PUMP dan mendampingi KUB secara terus menerus selama

berlangsungnya PUMP. Tenaga Pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, diprioritaskan direkrut dari Tenaga Pendamping PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan tahun 2009/2010.

TPD bertugas :

- 1) Melakukan identifikasi kelayakan rencana usaha KUB calon penerima BLM;
- 2) Memberikan bimbingan manajemen usaha penangkapan ikan;
- 3) Membantu dan mendampingi KUB dalam penyusunan RUB dan dokumen administrasi lainnya;
- 4) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar;
- 5) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KUB;
- 6) Membantu KUB dalam membuat laporan perkembangan PUMP sesuai pedoman teknis;
- 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan sesuai pedoman teknis.

f. Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak PPTK BLM-PUMP

PPTK bertugas untuk memonitoring, mengawasi kegiatan nelayan, melakukan penyuluhan mengenai program terhadap kelompok nelayan, memberikan laporan rutin bagaimana perkembangan kelompok yang sudah dibantu dan melaporkan permasalahan yang dihadapi nelayan.

B. Kerangka Konseptual

Program BLM-PUMP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok nelayan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat nelayan meningkatkan ekonomi melalui pendanaan modal usaha. Program BLM-PUMP telah dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang beribukotakan Kota Painan. Dalam pelaksanaan kegiatan BLM-PUMP di daerah ini banyak masyarakat yang kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang menyebabkan keterbatasan ekonomi terhadap nelayan.

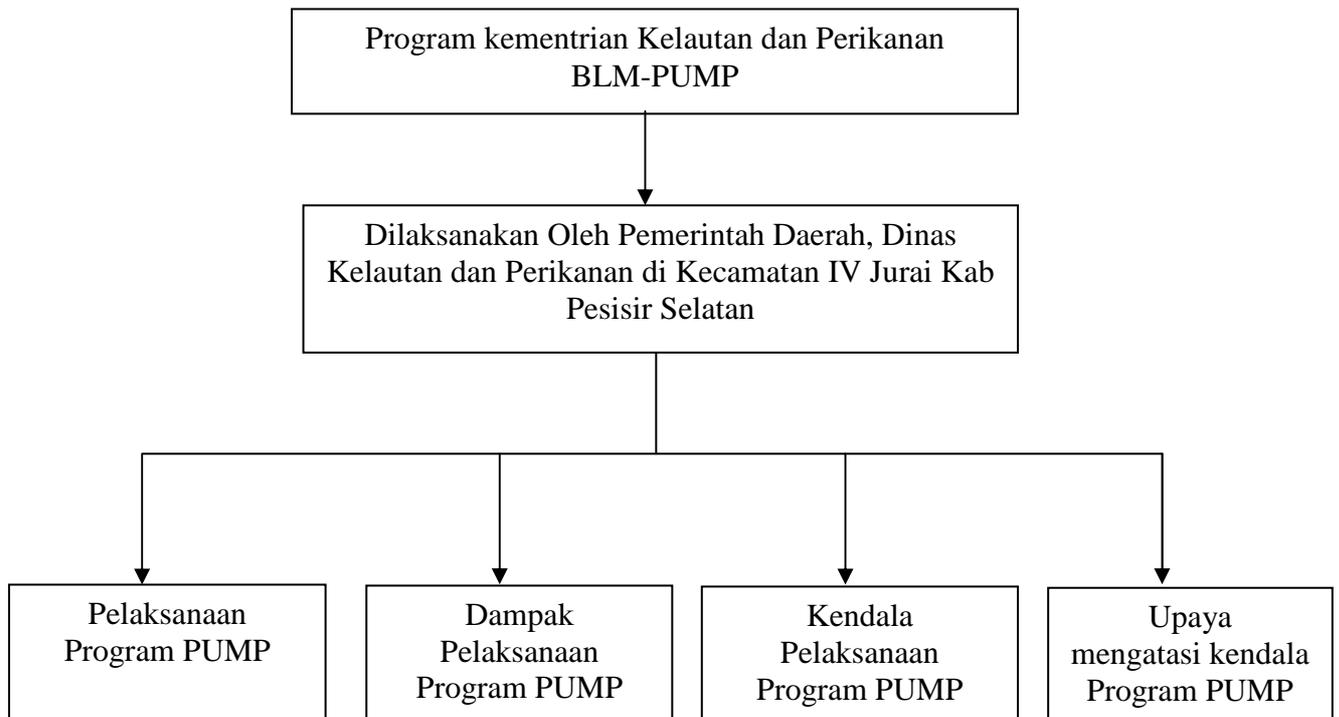
Karl E. Case (2004: 412) dalam buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro memberikan penjelasan mengenai kemiskinan bahwa kemiskinan menjadi penyebab berlanjutnya kemiskinan karena negara-negara yang miskin tidak mampu berhemat dan berinvestasi secara memadai untuk menghimpun stok modal yang akan membantu mereka bertumbuh.

Dapat diketahui bahwa masyarakat yang miskin tidak selalu diakibatkan oleh masyarakat yang malas, atau tidak mencari pekerjaan. Masyarakat yang miskin juga disebabkan oleh petinggi negara tersebut yang sibuk memperkaya diri sendiri dan tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat. Kemiskinan yang menimpa masyarakat Kelautan dan Perikanan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Kenapa membahas kemiskinan adalah karena masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan yang disebabkan oleh masyarakat mengalami kendala dalam masalah sarana dan prasarana untuk melaut yang mengakibatkan hasil tangkapan dari hasil laut sering mengecewakan yang mana menjadi nelayan mayoritas merupakan mata pencaharian dari masyarakat pesisir. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat kelauatan dan perikanan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses pemodal, pasar dan teknologi.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam menggambarkan Kerangka konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teorits, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Dapat dilihat bahwa program BLM-PUMP merupakan program dari Pemerintah pusat yaitu kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana pelaksanaan dari Program PUMP , bagaimana dampak dari pelaksanaan Program PUMP, bagaimana kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Program PUMP, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai macam kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Program tersebut.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV sebelumnya, maka pada BAB V ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLM PUMP) di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan di Kecamatan IV Jurai dimulai pada tahun 2011 dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping dan diketahui oleh Kepala Kampung. Untuk membuat RUB masyarakat nelayan didampingi oleh Tenaga Pendamping, jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 100jt / kelompok, kelompok membukak rekening di bank nagari/BRI, nelayan tidak menerima bantuan berupa uang, melainkan berupa barang sesuai dengan RUB yang mereka usulkan penyaluran bantuan langsung diberikan kepada setiap anggota kelompok berupa sampan, mesin robin, jalar, *fibber*. Bantuan tersebut dapat menunjang perekonomian nelayan dalam mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak.
2. Dampak Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dapat merubah perekonomian masyarakat nelayan, seperti nelayan dulunya melaut dengan meminjam sampan, sekarang nelayan tersebut sudah mempunyai sampan sendiri. Program Bantuan Langsung Masyarakat

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan di Kecamatan IV Jurai sudah berjalan dan terlaksana sampai kesasaranya dan nelayan yang menjadi sasaran program tersebut sudah mendapatkan hasil atas usaha dan kerja keras untuk menyambung hidup yang lebih berdaya dan mandiri.

3. Kendala dalam program pengembangan usaha mina pedesaan adalah pelaporan oleh Tenaga Pendamping ke Penyelenggara Penyuluh Tenaga Kontrak, kendala dalam sosialisasi program Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan adalah kehadiran kelompok masyarakat nelayan sangat kurang dalam mengikuti sosialisasi, kendala dalam pengembalian pinjaman, kurangnya minat masyarakat untuk mengembalikan pinjaman, masyarakat beranggapan bantuan tersebut adalah bantuan lepas yang menurut mereka tidak perlu untuk dikembalikan.
4. Upaya Pelaporan dari Tenaga Pendamping ke Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak yang dilakukan adalah Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak telah melakukan teguran kepada Tenaga Pendamping untuk memberikan laporan rutin, upaya sosialisasi yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi secara pribadi kepada setiap anggota kelompok nelayan, upaya yang dilakukan Pengembalian Pinjaman adalah terus memberikan penekanan kepada kelompok nelayan bahwa bantuan yang diberikan adalah bantuan bergulir yang bukan secara cuma-cuma diberikan kepada kelompok nelayan.

B. Saran

Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan selaku dari pelaksana program, saran yang dapat diberikan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaanagar tidak terpaku pada pedoman teknis Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaandari pusat, karena dinas terkait lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan yang ada didaeranya.
2. Membina masyarakat nelayan yang mendapat bantuan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaanagar dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan proposal yang telah diajukan.
3. Saran diberikan kepada Penyelenggara Penyuluh Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping dalam pelaksanaan BLM PUMP di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan adalah koordinasi merupakan hal yang sangat penting, diharapkan pada Tenaga Pendamping dan Penyelenggara Penyuluh Tenaga Kontrak untuk lebih profesional dalam menjalankan kegiatan program tersebut, karena jika hubungan pribadi di bawa pada pekerjaan maka hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, alasan masyarakat yang lebih mementingkan melaut dari pada mengikuti sosialisasi kegiatan/pelatihan – pelatihan, seharusnya dijadwalkan selama hari – hari tidak bekerja, seperti ; periode sepi menangkap ikan (terang bulan) atau cuaca buruk.
4. Saran untuk Dinas terkait jika memberi bantuan itu harus dikontrol terus, diawasi terus bagaiman perkembanganya dimasyarakat, misalnya dilapangan

kalau memang bantuan tersebut sudah berjalan di lapangan, itu harus dipantau kelengkapan apakah batuan diberikan memiliki kendala atau kekurangan, maka kekurangan itu haru ditambah atau dipenuhi jadi bantuan tersebut tidak tersendak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif, Satria. 2009. *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press
- Desiree Zuraida dkk. 1993, *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan, Pokok- Pokok Pikiran Selo Soemadjan*. Jakarta
- Elfindri dkk. 2009. *Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir*: Badouse Media
- Edi Suharto. 2010, *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*.PT Reflika Aditama. Bandung
- Julia Brannen. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Karl E. Case. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Indeks
- Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Muyadi S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*.PT Raja Grafindo. Jakarta
- Panayotou.2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta.
- Subri, M, 2005, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soetomo.2006, *Manajemen Sumber daya manusia*. PT Rineka : Jakarta
- Soekidjo Notoatmadjo,1998.*Pengembangan sumber daya manusia*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sumaryadi, I Nyoman.(2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom danPemberdayaan Masyarakat*.Jakarta : Citra Utama
- Syarif Makmur. 2008, *Pemberdayaan sumber daya manusia dan efektifitas organisasi*. Rajawali Press: Jakarta
- Smith. 2005, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.